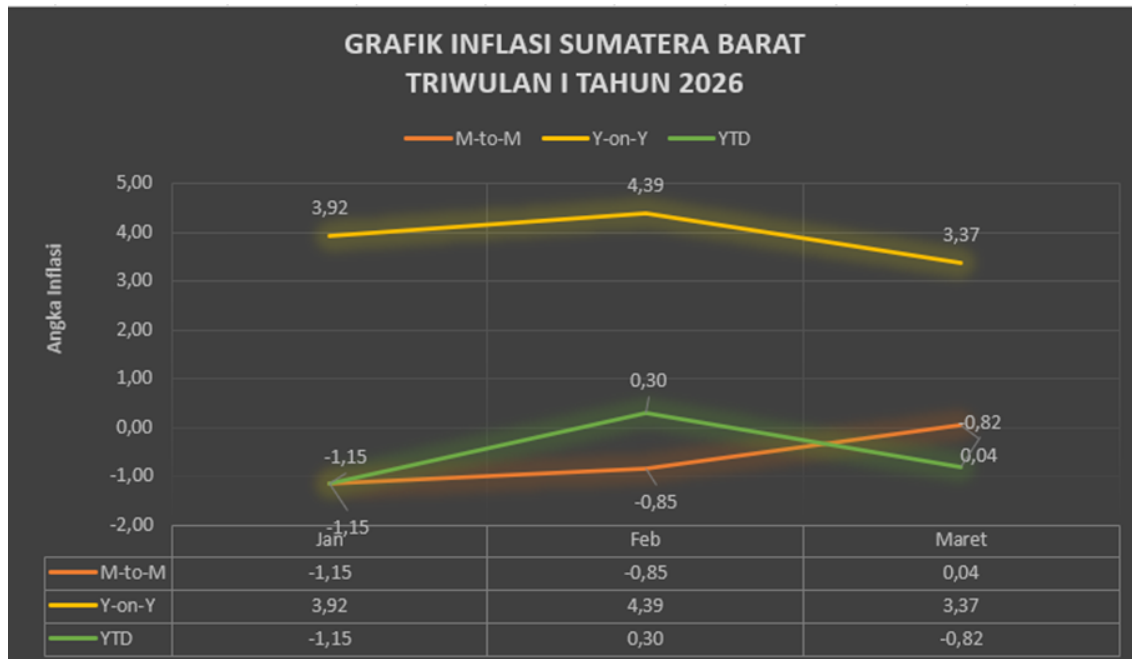


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi di Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan I Tahun 2026, sebagai berikut :

1. Januari 2026, Sumatera Barat tercatat deflasi sebesar 1,15% (mtm) yang disumbang dari kelompok makanan, minuman dan tembakau (-3,47%) dan Kelompok perumahan, air listrik dan bahan bakar rumah tangga (-0,63%) dengan komoditas penyumbang adalah cabe merah (-1,16%), Tarif Air Minum PAM (-0,12%), Bawang merah (-0,08%), angkutan antar kota (-0,05%), cabai hijau (-0,05%), buncis (-0,03%), Telur ayam ras (-0,03%), cabai rawit (-0,03%) kentang (-0,02%) dan Ikan Tongkol/ikan ambu ambu (-0,01%). Komoditas pendorong inflasi (mtm) adalah emas perhiasan (0,13%), Tomat (0,04%), beras (0,04%), ikan nila (0,03%) Ikan asin teri (0,02%), ikan kembung, ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso aso (0,02%), terong (0,02%), Ikan Cakalang/Ikan sisik (0,02%), Kacang Panjang dan Ayam goreng (0,01%). Sedangkan secara Tahunan inflasi Januari 2026 sebesar 3,92% (yoy), lebih tinggi dibanding inflasi Desember 2025 sebesar 2,92% (yoy).
2. Februari 2026, Sumatera Barat tercatat inflasi sebesar 0,30% (mtm) yang disumbang dari kelompok makanan, minuman dan tembakau (0,02%) dan Kelompok perumahan, air listrik dan bahan bakar rumah tangga (0,14%) dan Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya (0,14%) dengan komoditas penyumbang inflasi adalah cabe merah (0,26%), Emas perhiasan (0,14%), Tarif Air Minum (0,12%), Daging Ayam Ras (0,04%) dan Jengkol (0,04%) dan komoditas penyumbang deflasi cabe rawit (0,13%), bawang merah (-0,10%) kangkung (-0,04), telur ayam ras (-0,03%) dan Bayam (-0,03%). Sedangkan secara tahunan inflasi Februari sebesar 4,39% (yoy), lebih tinggi dibanding inflasi Januari 2026 yakni 3,92% (yoy).
3. Maret 2026, Sumatera Barat tercatat inflasi sebesar 0,04% (mtm) yang disumbang dari kelompok Makanan, minuman dan tembakau (0,06%), Transportasi (0,05%), dengan komoditas penyumbang inflasi adalah daging ayam ras (0,05%), jengkol (0,04%), ikan tongkol/Ambu ambu (0,04%) bensin (0,03%) dan udang basah (0,03%). Untuk komoditas penyumbang deflasi adalah cabe merah (-0,22%), Emas Perhiasan (-0,12%), Tomat (-0,05%) Angkutan Udara (-0,04%) dan Bawang merah (-0,03%). Sedangkan secara tahunan inflasi April sebesar 3,37% (yoy), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya 4,39% (yoy).

Berikut fluktuasi inflasi Sumatera Barat pada Triwulan I tahun 2026 dapat dilihat pada grafik dibawah ini, baik secara bulanan, tahunan dan year to date, sebagai berikut :



2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Selama triwulan I realisasi inflasi Sumatera Barat sangat berfluktuasi dengan komoditi penyumbang inflasi dari kelompok komoditi pangan antara lain cabe merah, daging ayam ras, jengkol, beras, tomat dan ikan. Selain itu dari kelompok perumahan yakni kenaikan tarif air minum, kelompok transportasi yakni bensin dan angkutan udara serta dari kelompok perawatan pribadi adalah emas perhiasan. Adapun penyebab inflasi pada Triwulan I didominasi karena meningkatnya permintaan untuk persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 1447. Selain itu, dari konsumsi Rumah tangga karena adanya penyesuaian biaya hidup terjadi karena kenaikan tarif air minum (PAM) dan dari sisi transportasi seiring dengan kenaikan harga bensin dan tarif angkutan udara serta kenaikan harga emas perhiasan seiring dengan meningkatnya harga emas dunia yang mendorong inflasi pada triwulan I di Sumatera Barat.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan agar inflasi tetap terjaga, tim pengendalian inflasi Sumatera Barat selama Triwulan I tahun 2026 telah melakukan berbagai upaya, sebagai berikut :

1. Keterjangkauan Harga

1. Melaksanakan Sidak Pasar secara Terpadu Tim Pengendalian Inflasi Sumatera Barat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sumatera Barat Bapak Arry Yuswandi bersama Asisten II Perekonomian dan Pembangunan dan Kepala Biro Perekonomian serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Bulog Divre Sumbar, Kepala BPS Sumbar dan Kepala OPD lingkup Pemprov Sumbar yang terkait pada tanggal 13 Maret 2026;
2. Melaksanakan Gerakan pangan Murah dan Operasi pasar secara masif dan bersubsidi.
3. Gerakan pangan Murah keliling dengan memanfaatkan kendaraan Box keliling di Kota padang dan ke Kab Kota.
4. Intervensi harga dengan memaksimalkan peran TTI center untuk melakukan intervensi harga pangan dengan memutus mata rantai distribusi dari petani langsung ke

konsumen.

1. Ketersediaan Pasokan

1. Himbauan Gerakan Menanam di polybag kepada masyarakat dan ASN.
2. Pengaturan pola tanam yang terencana dan adaptif.
3. Pembangunan green house untuk komoditi cabe merah, bawang merah dan terkhusus di daerah sampel IHK.
4. Meningkatkan Produksi dengan penggunaan pupuk organik lokal dan pemberian subsidi benih dan bibit bermutu.
5. Pemanfaatan resi gudang untuk cadangan beras dan jagung serta memanfaatkan cold storage untuk penyimpanan bahan pangan pada saat musim panen berlebih.

2. Kelancaran Distribusi

1. Melaksanakan dan memperluas Kerjasama antara daerah, baik antar daerah di dalam Provinsi maupun dengan provinsi tetangga (Jambi dan Sumsel) dengan konsep G to G dan B to B.
2. Mempercepat perbaikan jalan dan jalur distribusi yang rusak untuk memastikan kelancaran arus barang pangan .
3. Mengembangkan sistim rantai pasok terintegrasi yang menghubungkan petani hingga konsumen.

3. Komunikasi Efektif

1. Mengikuti rapat koordinasi mingguan pengendalian inflasi yang difasilitasi Kemendagri setiap minggu;
2. Menyiapkan bahan paparan pimpinan untuk rapat koordinasi mingguan pengendalian inflasi;
3. Melaksanakan Rapat-rapat teknis pengendalian inflasi dengan TPID Provinsi dan TPID Kab Kota se Sumatera Barat.
4. Rapat pembahasan program unggulan Inovasi TPID Award 2025 tanggal 13 Februari 2026 di Ruang Rapat Biro Perekonomian;
5. Melaksanakan Capacity Building TPID Sumatera Barat dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja TPID se Sumatera Barat Tahun 2025 pada tanggal 19 - 20 Februari 2026 di ZHM Premier Hotel Padang;
6. Melaksanakan Diskusi Implementasi Kerjasama Antar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Provinsi untuk pengendalian inflasi di Ruang Rapat Excelent Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat pada Hari Senin, 02 Maret 2026;
7. Rapat Koordinasi dan FGD dengan topik Prakiraan Cuaca dan Mitigasi Risiko Untuk Menjaga Keberlangsungan Produksi Pertanian tanggal 12 Maret 2026 di Bank Indonesia Sumatera Barat;
8. Melaksanakan rapat menindaklanjuti Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Dalam Negeri Nomor 500.2.5/0845/Bangda perihal Evaluasi Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025 tanggal 13 Februari 2026;
9. Menerbitkan Surat Gubernur Nomor 500/32/Ro-Eko Setda/I/2026 tanggal 27 Januari 2026 perihal Tindak Lanjut HLM TPID Triwulan I Tahun 2026 untuk Kepala OPD/Instansi Terkait Di Provinsi Sumatera Barat;
10. Menerbitkan Surat Gubernur Nomor 500/33/Ro-Eko Setda/I/2026 tanggal 27 Januari 2006 perihal Tindak Lanjut HLM TPID Triwulan I Tahun 2026 untuk Bupati/Walikota se Sumatera Barat;
11. Menerbitkan Surat Gubernur Nomor 500/71/III/Ro-Eko Setda/2026 tanggal 30 Maret 2026 tentang Tindak Lanjut Rapat Koordinasi dan FGD topik

Prakiraan Cuaca dan Mitigasi Risiko Untuk Menjaga Keberlangsungan Produksi Pertanian tanggal 12 Maret 2026;

12. Mengoptimalkan informasi perkiraan cuaca dari BMKG sebagai dasar dalam perencanaan tanam.
13. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada petugas E-Numerator pangan agar data harga dapat dukumpul tepat waktu dan akurat.

-

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dari kegiatan pengendalian inflasi yang dilakukan beberapa evaluasi kebijakan pengendalian inflasi Triwulan I Tahun 2026 diantaranya melalui pelaksanaan High Level Meeting, Rapat Koordinasi teknis, gerakan pangan murah, sidak pasar dan lain lain yang hasilnya dilihat dari realisasi inflasi dengan trend prositif dimana pada Januari 2026 inflasi Sumatera Barat 3,93% (yoy) dan berada diatas realisasi inflasi nasional, namun pada Maret 2026 inflasi Sumatera Barat berhasil ditekan menjadi 3,37%(yoy) dan lebih rendah dibanding inflasi nasional. Pada Januari Sumatera Barat juga mencatat deflasi secara mtm dan bahkan deflasi terdalam di Indonesia sebesar -1,15% (mtm), ini menunjukkan bahwa intervensi harga berdampak positif terhadap realisasi inflasi.

Pelaksanaan strategis 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) sangat efektif dilakukan dengan melaksanakan gerakan pangan murah dan operasi pasar secara masif di Kabupaten Kota terbukti membantu dalam menstabilkan harga, memanfaatkan kendaraan box TTIC untuk GPM keliling dengan memperluas jangkauan intervensi ke daerah daerah yang sulit diakses. Untuk ketersediaan pasokan dengan pemanfaatan dan pembangunan green house untuk cabe merah dan bawang merah terutama di daerah sampel inflasi (IHK) serta mengatasi ketergantungan pada musim tanam konvensional. Selain itu, menggalakan gerakan menanam di polybag bagi ASN dan masyarakat untuk menekan permintaan pasar pada komoditas hortikultura. Pada strategi kelancaran distribusi dengan melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak menjadi kunci utama dalam menjaga arus pasokan tetap lancar terutama pasca bencana alam. Selain perbaikan infrastruktur jalan juga mengoptimalkan realisasi kerjasama dengan provinsi tetangga serta mengevaluasi KAD KAD yang sudah disepakati dan belum ada tindak lanjut. Selanjutnya pada strategis komunikasi efektif dengan mengoptimalkan koordinasi yang intensif antara sesama tim TPID provinsi dan TPID Kab Kota se Sumatera Barat serta instansi/lembaga terkait.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dari beberapa kegiatan pengendalian inflasi selama triwulan I Tahun 2026 beberapa rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah berdasarkan strategi 4 , sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga
1. Tetap melanjutkan pelaksanaan gerakan pangan murah dan operasi pasar dengan memperhatikan ketepatan komoditas, waktu sasaran dan lokasi pelaksanaan.

Mengoptimalkan penggunaan kendaraan box keliling untuk menjangkau daerah daerah yang sulit di akses sehingga intervensi lebih merata.

3. Memaksimalkan peran TTIC dalam memutus mata rantai distribusi yang terlalu panjang antara petani dan konsumen.
4. Mempedomani neraca pangan yang telah disusun untuk memetakan ketersediaan dan kebutuhan pangan di setiap daerah

2. Ketersediaan Pasokan

1. Memanfaatkan green house untuk komoditas cabe merah dan bawang merah terutama di daerah daerah IHK.
2. Menyusun pola tanam yang terencana dengan memanfaatkan informasi perkiraan cuaca dari BMKG.
3. Mengaktifkan sistim resi gudang untuk beras dan jagung
4. Memanfaatkan cold storage untuk menyimpan bahan pangan saat produksi berlebih.
5. Tetap mendorong ASN dan Masyarakat untuk melakukan gerakan menanam dengan polybag.
6. Berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam optimalisasi pemanfaatan green house untuk cabe merah dan bawang merah,
7. Percepatan perbaikan jaringan irigasi pertanian pasca bencana.
8. Melakukan sidak ke pasar pasar dan distributor untuk memastikan kepatuhan terhadap HET dan memberikan teguran bagi yang melanggar.

3. Kelancaran Distribusi

9. Memperkuat kerjasama antar daerah G to G dan B to B baik antara daerah di dalam provinsi maupun dengan provinsi tetangga.
10. Mempercepat perbaikan jalan yang rusak pasca bencana.
11. Memberikan subsidi ongkos angkut terutama untuk daerah yang sulit dijangkau guna mengantisipasi disparitas harga yang tinggi di wilayah tersebut.
12. Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk memastikan kelancaran distribusi bahan pangan di jalur jalur utama distribusi dan memastikan tidak hambatan pasokan.

4. Komunikasi Efektif

1. Menyediakan sistim informasi data dan harga pangan yang terintegrasi di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
2. Melakukan pembinaan rutin kepada petugas E-numerator pangan agar data yang dihasilkan lebih akurat, tepat waktu, tepat sasaran sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan
3. Melaksanakan rapat rapat koordinasi rutin baik Provinsi dan kab Kota.
4. Mematuhi dan melaksanakan rencana aksi pada setiap kebijakan pengendalian inflasi yang diterbitkan melalui surat-surat Gubernur.